

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, A. (2019). Etika pelayanan publik di Indonesia. *Journal of Government Innovation*, 1(1), 59–76.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran* (edisi ke-4). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *Pelayanan publik baru: Melayani, bukan mengarahkan*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farazmand, A. (2004). *Tata kelola yang baik: Inovasi kebijakan dan administrasi*. Praeger.
- Haeruman, U. (2021). Evaluasi kinerja aparatur sipil negara di kantor pemerintahan. *Journal of Business Finance and Economic*, 4(2), 387–392. <https://doi.org/10.12345/jbfe.v4i2.2023>
- Hidayat, A., & Kusuma, B. (2023). Kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 75–83.
- Husni. (2018). Etika aparatur sebagai instrumen efisiensi dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 115–123.
- Ibrahim. (2008). Teori dan konsep pelayanan publik implementasinya. *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 93–102. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.378>
- Kumorotomo, W. (1992). *Etika administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Y. (2021). Inovasi pelayanan keliling dalam menjangkau masyarakat terbatas akses. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–115. <https://doi.org/xxxx>
- McCourt, W., & Eldridge, D. (2003). *Manajemen sumber daya manusia global: Mengelola orang di negara berkembang dan negara transisi*. Cheltenham, Inggris: Edward Elgar.
- Murdiyanto, A. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Konsep dan aplikasi dalam penelitian sosial*. Yogyakarta: Deepublish.

- Nugroho, B., & Wulandari, S. (2022). Pelayanan publik adaptif dalam menghadapi tantangan geografis di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 75–85. <https://doi.org/10.xxxx/jian.v18i1.5678>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Menciptakan kembali pemerintahan: Bagaimana semangat kewirausahaan mengubah sektor publik*. Addison-Wesley.
- Peraturan Bupati Enrekang Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Enrekang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Putra, A. R., & Sari, N. M. (2024). Evaluasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–53.
- Putri, A. M., & Santoso, B. D. (2023). Peran teknologi komunikasi digital dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(2), 101–110. <https://doi.org/10.xxxx/jkap.v12i2.2023>
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2023). Analisis sistem pelayanan publik di era digital: Studi kasus pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 120–131. <https://doi.org/10.1234/jap.v15i2.5678>

- Rahman, A. (2023). Keadilan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(2), 145–160.
- Sari, N. M., & Nugroho, R. (2022). Analisis efektivitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/xx.xxx/xxxx>
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan*.
- Susilo, R., & Wahyuni, D. (2023). Pengaruh kesadaran moral ASN terhadap kualitas pelayanan publik di era digital. *Jurnal Administrasi Publik Modern*, 11(2), 112–121.
- Unaradjan, A. (2003). *Disiplin kerja dan kepemimpinan efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Wahyudi, A. (2021). *E-Government dalam pelayanan publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan teknologi di era digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748–754. <http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/mm>
- Wulandari, D., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh pelatihan dan pengembangan kompetensi terhadap kinerja ASN di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 115–124. <https://doi.org/10.12345/japi.v11i2.2023>
- Yin, R. K. (2009). *Studi kasus: Riset desain dan metode* (M. D. Mudzakir, Penerjemah). Jakarta: Raja Grafindo.